

Perkembangan dan Prospek: Diplomasi Maritim Presiden Jokowi dan Poros Maritim Dunia

Progress and Prospects: President Jokowi's Maritime Diplomacy and Global Maritime Fulcrum

Michael Romulus Panggabean^{a,1}, Helga Yohana Simatupang^{b,2}

^{a,b}Program Studi Hubungan Internasional UPU, Jl. K.L. Yos Sudarso KM 6.5 Tj. Mulia, Medan, 20241, Indonesia
michael.r.panggabean@gmail.com¹, helgayohana@potensi-utama.ac.id²

ABSTRAK

Saat Presiden Joko "Jokowi" Widodo dilantik untuk pertama kalinya pada tahun 2014, beliau mengenalkan visi dan komitmennya untuk mengubah Indonesia menjadi sebuah poros maritim dunia, dan menjadikan konsep tersebut sebagai strategi besar pertama pada kebijakan luar negeri pemerintahannya. Presiden Jokowi mempromosikan konsep tersebut ke berbagai pertemuan internasional di luar negeri, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyuarakan hal yang serupa kepada perwakilan internasional. Pemerintahan Presiden Jokowi mengambil Langkah lebih jauh hingga mengkodifikasi visi tersebut di tahun 2017 melalui Peraturan Presiden tentang Kebijakan Laut Nasional. Akan tetapi, saat Presiden Jokowi dilantik untuk periode keduanya di tahun 2019, tampaknya semangat merealisasikan strategi besar tersebut telah pudar dari ataupun anggota pemerintahan barunya. Hal ini dapat dilihat dengan tidak disebutnya seputar strategi besar tersebut oleh Presiden Jokowi ataupun para menternya. Walaupun Presiden Jokowi dan pemerintahannya tidak secara langsung membahas akan visi maritim dunia, tetapi konsepnya sangat relevan dan dibutuhkan untuk negara kepulauan yang sangat luas seperti Indonesia. Pada periode pertama Presiden Jokowi telah ada usaha implementasi daripada konsep poros maritim dunia, tetapi berbagai keterbatasan secara ekonomi, keamanan, dan kebijakan luar negeri menghadang perkembangannya. Diplomasi Maritim tetap menjadi perhatian penting yang Presiden Jokowi harus dorong sebelum mengakhiri masa jabatannya dan akan menjadi peninggalan yang penting bagi penerusnya untuk dibina oleh pemerintahan berikutnya. Walaupun transformasi ekonomi dan pemulihan menjadi prioritas pemerintahan periode kedua Presiden Jokowi, akan tertahan potensi Indonesia jika pandangan strategi maritimnya tidak diperluas. Indonesia memiliki kapasitas untuk menjadi sebuah kuasa maritim dunia dan disayangkan jika Indonesia tidak memegang kendali pengaruh maritim di kawasannya. Konsep poros maritim dunia mungkin bukan titik permulaan terkuat, tetapi bukan berarti untuk konsep tersebut dilupakan sepenuhnya. Sebuah strategi yang lebih komprehensif dan sistematis dan dikembangkan untuk mencapai tujuan yang sama. Walaupun kondisi saat ini akan konsep poros maritim dunia lebih ke sebuah retorika, materialisasi akan pokok pemikirannya tidak seharusnya menjadi estafet yang terhenti pada pemerintahan saat ini. Menjembatani perkembangan yang sudah ada pada konsep poros maritim dunia dengan prospek yang ada di masa hadapan seharusnya dibawa dalam kepentingan di transisi kekuasaan saat Indonesia memilih presiden berikutnya di tahun 2024.

Kata Kunci : Poros maritim dunia, Diplomasi maritim, Kebijakan luar negeri, Kuasa maritim, Geopolitik

ABSTRACT

When President Joko "Jokowi" Widodo first came into power in 2014, he introduced his vision and commitment of transforming Indonesia into a global maritime fulcrum (GMF), highlighting the notion as his first grand strategy of his administration's foreign policy. President Jokowi promoted the concept in multiple international meetings abroad, in which his foreign minister, Retno Marsudi, echoed the same ideas to various international dignitaries. President Jokowi's administration even took the extent further by codifying the vision in 2017 through a Presidential Regulation on National Sea Policy. However, when President Jokowi took oath for a second term in 2019, it seems there have been less enthusiasm from himself and his newly sworn in administration regarding the grand strategy. This is shown with even the words surrounding the grand strategy have not been mentioned by the president or his ministers. Even though President Jokowi and his administration have not been blatant regarding the global maritime vision, but the concept is still very much relevant and viable for such vast archipelagic nation like Indonesia. The first term of Jokowi's presidency has shown efforts of implementation of the GMF concept, but various limitations in economic, security, and foreign policy aspects have halted the progress. Maritime diplomacy is still a very important concern that President Jokowi must push before leaving office and will be an important legacy for his successor to build upon in the next administration. Despite that economic transformation and recovery have

been the priority of President Jokowi's second term administration, it withholds the potential of Indonesia if a wider spectrum of maritime strategy is not brought forward. Indonesia holds the capacity to become a global maritime power and it does unjust to the nation if the country does not hold the steering wheel of maritime influence in the region. The GMF may have not been the strongest starting point, but neither should the concept be dismissed completely. It could always be built on with a more comprehensive and systematic strategy to reach the same means. Though the current state of the GMF lies more on a side of a rhetoric, but the materialization of the idea should not be a halted relay at the current administration. Bridging the progress of the GMF with the prospects that it holds in the future should be brought upon in the transition of power when Indonesia elects its next president in 2024.

Keywords : Global maritime fulcrum, Maritime diplomacy, Foreign policy, Maritime power, Geopolitics

Info Artikel :

Disubmit: 10 Januari 2024

Direview: 05 Februari 2024

Diterima : 08 April 2024

Copyright © 2024 – Journal UPU. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang membentang di Asia Tenggara, di antara Samudera Hindia dan Pasifik. Selain daripada itu, Indonesia juga berbatasan darat dengan tiga negara yaitu Malaysia, Timor Timur, dan Papua Nugini, serta berbatasan laut dengan sembilan negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, India, Australia, Vietnam, Filipina, Palau, dan Timor Timur. Indonesia memiliki luas daratan sekitar 1,8 juta km² dan luas perairan sekitar 93,000 km², yang jika digabungkan maka luas wilayah dasar Indonesia secara keseluruhan adalah sekitar 1,9 juta km². Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 258 juta jiwa menjadikan negara ini sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dengan luas sekitar 1,9 juta km² dari total wilayah pangkalan Indonesia, Indonesia mengklaim kedaulatan atas 17,504 pulau, dan 16,056 pulau di antaranya terdaftar di PBB (The Jakarta Post, 2017). Dengan posisi dan ukuran geografisnya, signifikansi Indonesia di kancah internasional tidak dapat dihindari, terutama di kawasan Asia Tenggara, dimana Indonesia menjadi tuan rumah sekretariat organisasi regional utama Asia Tenggara, ASEAN, di ibu kotanya, Jakarta.

Sejak kemerdekaannya dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 dan selama bertahun-tahun berdirinya, politik luar negeri Indonesia pada saat-saat tertentu terlihat sangat identik dengan sifat presiden yang berkuasa pada masa itu, sehingga kebijakan luar negeri Indonesia mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda pada periode waktu yang tertentu (Simatupang & Panggabean, 2022). Meskipun demikian, landasan kebijakan luar negeri Indonesia tetap konsisten melalui satu doktrin yang mendefinisikan dan memandu kebijakan luar negeri Indonesia (Simatupang & Panggabean, 2022). Sejak diadopsi pada tahun 1948, doktrin bebas aktif telah menjadi landasan politik luar negeri Indonesia, karena tujuannya adalah agar Indonesia menjalankan politik luar negeri aktif serta non-blok (Anwar, Indonesia's Foreign Policy After the Cold War, 1994). Ketika Indonesia mengadopsi doktrin tersebut pada tahun 1948, dunia sedang berada di tengah-tengah Perang Dingin dan terpecah menjadi dua blok yang berlawanan, satu blok dipimpin oleh Uni Soviet dan blok lainnya dipimpin oleh Amerika Serikat. Melalui doktrin politik luar negeri bebas aktif, hal tersebut merupakan respons Indonesia terhadap keadaan saat itu, dimana Indonesia memilih untuk tidak memihak pada salah satu dari kedua blok tersebut dan mengambil jalan yang independen (Anwar, Indonesia's Foreign Policy After the Cold War, 1994). Dalam menghadapi beragam perubahan di dunia, politik bebas dan aktif Indonesia dapat beradaptasi dan bertahan, merespons kesulitan-kesulitan saat ini, dan berfungsi sebagai jembatan teoretis antara dunia akademis dan realitas dunia nyata, serta Gagasan politik luar negeri yang bebas dan aktif tidak akan hilang dalam waktu dekat (Simatupang & Panggabean, 2022).

Indonesia memilih untuk berada di luar dua blok raksasa tersebut, dan tidak berkeinginan untuk berada di blok ketiga yang menentang dua blok yang sudah ada, melainkan untuk berkomitmen atas dasar solidaritas internasional, yang berarti Indonesia juga tidak memosisikan diri sebagai entitas yang netral dan tidak memihak dalam komunitas internasional (Hatta, 1953). Makna “bebas” dalam doktrin politik luar negeri Indonesia dapat diartikan tidak ikut serta dalam aliansi militer manapun, termasuk susunan pertahanan, dimana susunan pertahanan merupakan tren yang sangat lumrah pada masa Perang Dingin, dan dalam makna yang lebih luas dipandang sebagai sebuah perlawanan, dengan nasionalisme sebagai landasannya, terhadap segala bentuk ikatan dan kewajiban dengan pihak luar yang dapat menghambat Indonesia untuk secara independen menjalankan berbagai kebijakan untuk negaranya (Anwar, Indonesia’s Foreign Policy After the Cold War, 1994).

Pemerintah Indonesia mengklaim kedaulatan atas perairan antar pulau-pulanya sehingga menjadikannya sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negara. Hal ini dinyatakan dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 melalui Wawasan Nusantara (*Archipelago Principle*), yang dimana dari deklarasi tersebut Indonesia mendeklarasikan kedaulatan mutlak atas seluruh perairan yang berada di garis pangkal lurus akan pulau-pulanya (Butcher & Elson, 2017). Dari Deklarasi Juanda, klasifikasi baru akan kasus Indonesia dibuat melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada tahun 1982, karena Indonesia termasuk dalam kategori *archipelagic state* yang artinya negara-negara jenis ini mempunyai kedaulatan atas wilayah perairan kepulauannya (Butcher & Elson, 2017). Dengan Deklarasi Juanda, wilayah yurisdiksi Indonesia diperluas menjadi 4,5 juta km² (dengan perairan mencakup lebih dari separuh luas wilayah), kedaulatan negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi lebih dari 5 juta km², menjadikan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia dan ZEE terbesar ketiga di dunia (Butcher J., 2009).

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa perairan Indonesia merupakan salah satu aset terpenting negara. Pemerintah Indonesia menyadari hal ini, sejak awal berdirinya negara ini ketika para *founding fathers* mengembangkan Deklarasi Juanda dan bahkan hingga saat ini melalui berbagai tonggak pemerintahan yang telah dilalui Indonesia sepanjang sejarahnya. Perairan Indonesia akan selalu menjadi bagian penting dalam kebijakan Indonesia, baik dalam maupun luar negeri. Selalu menjadi prioritas bagi pemerintah Indonesia untuk dapat menjaga dan memanfaatkan perairannya sebaik mungkin. Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo membuat strategi besar maritim dengan mengumumkan Poros Maritim Global pada *East Asia Summit* (EAS) di Naypyidaw, Myanmar. Dalam EAS ke-9 tersebut, Presiden Jokowi menyatakan bahwa pusat gravitasi geopolitik dan geoeкономи dunia sedang bergeser dari Barat ke Timur, seiring dengan kebangkitan negara-negara Asia (Witular, 2014). Dengan dasar pemikiran tersebut, Presiden Jokowi meyakini bahwa peran laut akan semakin meningkat di Indonesia dan sebagai negara maritim, Indonesia harus menjadikan dirinya sebagai kekuatan bagi dua samudera yang mengelilinginya, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik (Witular, 2014). Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia harus mampu mengembangkan pulau-pulau di dalam dan di antara pulau-pulau tersebut, dengan adanya jalan tol laut untuk meningkatkan konektivitas yang lebih besar antar pulau-pulanya dan sistem pelabuhan yang dimodernisasi berstandar internasional di semua pelabuhannya yang dapat memfasilitasi pelayanan sesuai dengan prosedur internasional (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2015).

Di sisi lain, dengan menerapkan strategi maritim yang besar dan ambisius, Indonesia akan menghadapi tantangan yang sama besarnya. Tantangan yang dihadapi Indonesia ada secara tantangan internal maupun eksternal. Tantangan utama bagi Indonesia secara internal adalah mengelola koordinasi antar lembaga pemerintah secara efisien agar pembangunan yang ingin dicapai dapat dicapai sesuai dengan Poros Maritim Global. Sementara itu, secara eksternal tantangan utama bagi Indonesia adalah menjalin kerja sama yang luas dengan negara-negara tetangga yang berbatasan laut dengan Indonesia dan di tingkat global melalui strategi diplomasi maritim, serta peran negara sebagai *middle power* dalam permasalahan global.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Agar Indonesia dapat menerapkan strategi Poros Maritim Global, tantangan yang dihadapi Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu sebagai berikut:

- Identitas maritim; karena Indonesia perlu membangun sebuah budaya maritim. Pewarisan dari pemerintahan sebelumnya, belum ada identitas menonjol yang dapat menentukan kebijakan maritim Indonesia (Mangala, 2015).
- Diplomasi maritim; mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar, diplomasi maritim penting untuk menjalin hubungan regional yang kooperatif dan mencapai dua hasil penting, yaitu menjamin keamanan dan menyelesaikan sengketa perbatasan yang masih dihadapi saat ini sekaligus memberikan contoh kepemimpinan dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antarnegara. Indonesia terletak di jalur laut penting yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, dan Oseania serta merupakan titik persimpangan maritim yang penting (Selat Malaka, Sunda, Lombok, dan Makassar) (Mangala, 2015).
- Konektivitas maritim; dengan mengembangkan konektivitas antar pulau seiring dengan rencana Indonesia untuk memperluas pelabuhan laut dan pelabuhan laut dalam serta meningkatkan infrastruktur pelabuhan. Namun, tantangan ekonomi tidak dapat dihindari untuk mencapai pembangunan tersebut. Untuk mengatasinya, negara harus mempersempit disparitas sektor maritim dalam agenda pembangunan nasionalnya. Untuk itu, Indonesia harus membentuk dana khusus untuk meningkatkan infrastruktur dan pembangunan tersebut daripada hanya bergantung pada investasi asing (Mangala, 2015).

Pada EAS di bulan November 2014 silam, Presiden Jokowi meluncurkan Poros Maritim Dunia (*Global Maritime Fulcrum*) yang dibangun berdasarkan budaya maritim, sumber daya, infrastruktur, diplomasi, dan pertahanan. Tiga tahun kemudian, doktrin tersebut dikodifikasi dan diperluas melalui Peraturan Presiden tentang Kebijakan Laut Nasional. Namun, Poros Maritim Dunia menghilang saat Presiden Jokowi menjabat pada periode kedua dan terakhirnya. Baik istilah “maritim” maupun “diplomasi” tidak muncul satu kali pun dalam pidato pelantikannya (The Jakarta Post, 2019). Sebaliknya, Jokowi telah berjanji untuk fokus pada sumber daya manusia, infrastruktur, reformasi peraturan dan birokrasi, serta “transformasi ekonomi” yang lebih luas. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, yang diangkat kembali, juga menguraikan prioritas untuk lima tahun ke depan. Perdagangan dan investasi, perlindungan sipil, kedaulatan, kepemimpinan regional dan global, infrastruktur diplomatik. Ia menyebut fokus ini sebagai pendekatan “4+1”, meskipun ia tidak pernah menggunakan kata “maritim” dalam kaitannya dengan hal tersebut (The Jakarta Post, 2019).

3. METODE

Pada penelitian, metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk perkembangan dan prospek daripada diplomasi maritim Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Jokowi serta strategi Poros Maritim Dunia yang diimplantasikan semenjak 2014 silam. Dalam kajian ini telah digali pemahaman komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji, khususnya relevansi daripada posisi Indonesia sebagai *middle power* di tengah-tengah dinamika maritim di kawasan Indo-Pasifik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mendalami sejumlah topik penelitian kualitatif dalam subjek hubungan internasional dan beberapa bidang terkait.

Dalam penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data. Data tersebut diperoleh guna menghasilkan hasil yang diinginkan untuk tujuan dan jangkauan penelitian ini. Untuk menyempurnakan kajian ini, data sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data yang dipublikasikan dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk:

- Laporan dan dokumen instansi pemerintahan yang terkait;
- Berbagai laporan penelitian yang dihasilkan oleh peneliti, universitas, akademisi, dan lain-lain;

- Buku-buku yang ditulis oleh berbagai penulis, majalah, dan surat kabar;
- Artikel di media online;
- Jurnal;
- Situs laman resmi; dan
- Dokumen sejarah dan sumber terbitan lainnya.

Untuk mendukung bahan pustaka tersebut diperoleh informasi data tentang perjanjian-perjanjian terkait kemaritiman di kawasan Indo-Pasifik dan Indonesia. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, diolah, dan kemudian diperiksa. Selain daripada itu, data yang digunakan dalam penelitian ini akan fokus pada kerangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan relevansi penelitian ini dan menghindari redundansi data. Referensi yang disebutkan akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. Di akhir penelitian ini, penulis akan menyimpulkan temuan penelitian ini melalui analisis dan memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya tentang topik penelitian ini serta untuk Pemerintah Republik Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya, strategi Poros Maritim Dunia bukanlah sebuah strategi yang dikembangkan dengan baik. Strategi tersebut tidak didukung oleh penelitian dan pengembangan konsep yang mendalam. Sebaliknya, ini hanyalah sebuah alat kampanye yang berhasil bagi Presiden Jokowi untuk mengangkat namanya pada pemilu tahun 2014. Meski demikian, logika dan filosofi yang terdapat dalam Poros Maritim Dunia merupakan sesuatu yang sesuai dan layak bagi negara kepulauan terbesar di dunia (Kompas, 2014). Sayangnya, Presiden Jokowi tidak berinvestasi secara pribadi untuk menggunakan strategi Poros Maritim Dunia karena beliau mengatur agenda lain. Fokus utama beliau adalah pada proyek-proyek pembangunan, mulai dari infrastruktur hingga kesejahteraan sosial, dan hanya sesekali muncul dalam kebijakan luar negeri pada bidang investasi dan perdagangan. Kebijakan Maritim Nasional sebagian besar merupakan dokumen yang menaungi birokrasi, dengan menghubungkan program-program yang ada di berbagai sektor (Laksmana, Indonesia Sea Policy: Accelerating Jokowi's Global Maritime Fulcrum, 2017). Beliau tidak dapat menyatukannya dalam satu kerangka. Presiden Jokowi membiarkan kebijakan pertahanan dan hubungan antar sipil-militer berjalan secara mandiri dan membiarkan para penasihatnya (yang kebanyakan merupakan purnawirawan jenderal TNI) untuk membentuk kebijakan dan memperluas otonomi militer, dan komponen angkatan laut tidak mendapat perhatian khusus.

Presiden Jokowi juga membutuhkan waktu tiga tahun untuk memilih seorang komandan militer yang ia percayai secara pribadi, yaitu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Saat menjelang pemilu kembali pada tahun 2019, Presiden Jokowi dan para jenderal lainnya lebih mementingkan pengorganisasian militer, mulai dari memperkenalkan unit-unit baru hingga membuka pintu bagi lebih banyak perwira di kementerian sipil, daripada menyelaraskan operasi militer dengan strategi angkatan laut yang lebih besar. Penekanan ditempatkan pada dukungan terhadap ekspansi. Komponen kebijakan luar negeri pada Poros Maritim Dunia juga melemah. Hal ini disebabkan karena Menteri Luar Negeri Retno Marsudi terlalu berorientasi pada proses, dengan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melakukan reformasi birokrasi dan bergantung pada sarana multilateral yang ada seperti ASEAN (Laksmana, Indonesian foreign policy needs to focus more on impact than process, 2018). Akan tetapi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sendiri juga membutuhkan waktu untuk membentuk hubungan yang dekat dengan Presiden Jokowi sambil menangani permasalahan diplomatik penting dari dalam negeri.

Kepentingan geopolitik Indonesia telah digantikan oleh kekhususan, kelambanan birokrasi, dan politik dalam negeri. Sebagai contoh, Kementerian Luar Negeri seharusnya dapat menggunakan strategi Poros Maritim Dunia sebagai dasar untuk mengembangkan strategi dan pedoman untuk secara

efektif menangani sengketa Laut Cina Selatan dan intrusi Tiongkok ke perairan Indonesia, dan untuk mengatasi dampak persaingan strategis Amerika Serikat-Tiongkok. Sebaliknya, dasar daripada permasalahan dialihkan dan modal diplomatik dihabiskan untuk meyakini ASEAN dalam mengadopsi pandangan yang sangat salah mengenai Indo-Pasifik (Asia Global Institute, 2019). Selain daripada itu, lembaga-lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas sektor maritim masih terpecah-pecah dan pergeseran pengelompokan terus berlanjut. Presiden Jokowi menunjuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai penjaga pesisir Indonesia pada akhir tahun 2014, namun secara radikal melakukan restrukturisasi atau restrukturisasi pada administrasi sektor maritim, dimana banyak lembaga-lembaga dan kementerian yang terus membentuk ruangnya sendiri.

Dibawah pimpinan Susi Pudjiastuti, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berupaya merombak secara mendasar cara Indonesia menangani penangkapan ikan ilegal, yang terkadang bertentangan dengan lembaga dan kementerian lain. Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, mendorong pembentukan satuan tugas kepresidenan yang baru, yaitu Satgas 115, dan hal tersebut melambangkan perebutan kekuasaan birokrasi seputar keamanan maritim. Untuk melakukan patroli di wilayah perairan yang luas, perlu dilakukan rotasi dan sesekali bekerjasama antara KKP, Satgas 115 dan Bakamla. Masalah ini terhambat efisiensinya oleh fakta bahwa dua kementerian koordinator yang berbeda tumpang-tindih di sektor maritim. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Keamanan, dan Politik yang seharusnya mengkoordinasikan angkatan laut dan Kementerian Luar Negeri, namun Kementerian Perikanan yang kini memiliki kekuatan tersendiri untuk memberantas penangkapan ikan ilegal, namun berada di bawah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Presiden Jokowi sendiri mengalami kesulitan dalam koordinasi karena tidak memiliki pusat politik strategis yang setara dengan Dewan Keamanan Nasional seperti di Amerika Serikat. Kepengurusan pada Istana Presiden sendiri masih terbagi antara kepala staf, sekretaris negara, dan sekretaris kabinet. Poros Maritim Dunia merupakan strategi besar yang paling koheren secara konseptual bagi negara kepulauan Indonesia, namun Presiden Jokowi menyia-nyiakannya dengan meninggalkan doktrin tersebut pada pertengahan masa jabatan pertamanya. Pada masa jabatannya yang kedua, Presiden Jokowi tampaknya siap untuk menghilangkan pembentukan reformasi kelembagaan dan memilih menggandakan pembangunan ekonomi dan infrastruktur dengan mengorbankan hal-hal lain, termasuk kepentingan geopolitik Indonesia (Gammon, 2019).

A. Masa Depan Daripada Diplomasi Maritim Indonesia

Menurut Gilley dan O'Neil, pendekatan hierarki, atau lokasional, dapat dijelaskan sebagai kapasitas kekuasaan substansial yang dimiliki oleh negara-negara berukuran sedang dibandingkan dengan negara-negara baik besar maupun kecil serta lemah (Edstrom & Westberg, 2020). Mengenai indikator-indikator kekuasaan antar negara yang dapat diukur sehubungan dengan perbedaan jumlah penduduk, pengeluaran militer, lokasi geografis yang strategis, produk domestik bruto, dan lain sebagainya. Penggunaan metrik kuantitatif memiliki beberapa keuntungan yaitu kemampuan untuk mengukur kekuasaan negara secara objektif dan memfasilitasi perbandingan antar negara. Dengan kata lain, sebuah negara *middle power* yang besar dapat menggunakan sumber dayanya yang melimpah untuk menarik negara lain dan menjalin kerja sama yang bermanfaat. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan kekuatan daripada sumber daya sebagai operasionalisasi dari pendekatan hierarki. Dalam hal ini, Indonesia merupakan negara *middle power* yang kaya akan sumber daya, khususnya sumber daya alam.

Salah satu kekuatan Indonesia terletak pada wilayah maritimnya yang luas dan letak geopolitiknya. Dengan ini, Presiden Jokowi mendeklarasi kebijakannya untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah pusat maritim global untuk mentransformasikan Indonesia menjadi kekuatan maritim global. Indonesia adalah negara terbesar di Asia Tenggara dan negara kepulauan terbesar di dunia. Karena posisinya yang strategis antara Samudera Hindia dan Pasifik, serta antara benua Asia dan Australia, menjadikan Indonesia sebagai kawasan yang bersaing memperebutkan kepentingan negara-negara besar (Djalal,

1996). Di kawasan Asia-Pasifik sendiri dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, politik, dan militer negara-negara maju, negara-negara seperti Amerika Serikat, India, Australia, Tiongkok, dan Jepang sangat bergantung pada stabilitas, kebijakan luar negeri, dan pemikiran geopolitik Indonesia, karena Indonesia juga merupakan pemimpin daripada negara-negara di ASEAN (Laksmana, *The enduring strategic trinity: explaining Indonesia's geopolitical architecture*, 2011). Oleh karena itu, Indonesia memiliki kepercayaan diri untuk menetapkan dirinya di arena internasional melalui inisiatif menjadi pusat maritim global. Ini merupakan langkah penting menuju tercapainya Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia.

Hal yang kedua adalah pendekatan fungsional, yang menekankan tanggung jawab suatu kekuasaan pusat terhadap isu-isu spesifik yang berkaitan dengan pencapaian pengaruh secara spesifik di wilayah fungsionalnya yang tercermin dalam kepentingan nasionalnya. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara pusat cenderung mengejar tujuan kebijakan luar negerinya di bidang-bidang tertentu yang memiliki kepentingan tertinggi, yang sering disebut sebagai “*niche diplomacy*”. Menurut Gareth Evans, *niche diplomacy* berarti memfokuskan sumber daya pada bidang tertentu di mana sumber daya tersebut dapat menghasilkan keuntungan yang berarti, daripada mencoba mencakup bidang yang didominasi oleh negara-negara kecil, dibandingkan didominasi oleh negara-negara besar (Thies & Sari, 2018). “*Niche area*” Indonesia dalam hal ini adalah maritim, mengingat Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas. Melalui strategi Poros Maritim Dunia, Indonesia mengemban tanggung jawab sebagai negara maritim terbesar di dunia. Presiden harus berkomitmen untuk membangun kembali budaya maritim dan memperbaiki kebijakan nasional terhadap sektor maritim.

Pada tanggal 20 Februari 2017 silam, Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 tentang Kebijakan Maritim Indonesia. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman umum implementasi melalui kebijakan dan program serta kegiatan maritim di lingkungan pemerintah, baik di dalam maupun di luar kementerian. Diharapkan dapat membantu implementasi Poros Maritim Dunia lebih cepat. Presiden Jokowi pertama kali secara resmi mengenalkan sebuah doktrin maritim yang akan membuat aktor internasional lainnya menghormati upaya pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan maritim dan sarana untuk pembangunan perdamaian dan keamanan di tingkat regional dan internasional (Muhibat, 2017).

Poros Maritim Dunia sendiri memiliki tujuh pilar untuk mencapai tujuan tersebut (Muhibat, 2017), yaitu:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelautan;
2. Keamanan Maritim dan Penegakan Hukum;
3. Kelembagaan dan Tata Kelola Laut;
4. Pengembangan Ekonomi Kelautan;
5. Pengelolaan Laut, Perdamaian dan Perlindungan Maritim;
6. Budaya maritim dan diplomasi maritim.

Dengan demikian, Indonesia tidak hanya perlu memfokuskan kebijakan ini pada sisi domestik saja, namun juga perlu menerapkan kebijakan ini agar dapat menjadi mediator sengketa maritim antar negara tetangga. Status Indonesia sebagai negara *middle power* telah diperhatikan dan diakui di arena internasional.

Hal yang ketiga adalah pendekatan perilaku, yang mengacu pada tindakan nyata negara-negara dalam permasalahan internasional; yaitu menjadi warga negara internasional yang baik, mendukung multilateralisme, mendukung tatanan internasional, dan bertindak sebagai mediator dalam perselisihan. Mekanisme daripada “warga internasional yang baik” menimbulkan asumsi berbeda di antara banyak akademisi. James Souter berpendapat bahwa negara harus mematuhi aturan dan nilai-nilai umum untuk menjadi warga negara internasional yang baik, termasuk dalam hak asasi manusia, multilateralisme, hukum internasional, dan lain sebagainya (Souter, 2016). Namun demikian, dapat dikatakan bahwa

kebijakan luar negeri negara-negara kekuatan pusat tidak didorong oleh kepentingan negara-negara tersebut. semata-mata bersifat altruistik, namun negara-negara tersebut juga bertindak sebagai instrumen (Thies & Sari, 2018). Warganegara mewakili jalan tengah antara realisme dan idealisme. Karena kondisi ini berbeda-beda tergantung situasi dan kepentingan yang dihadapi, karena mungkin tidak selamanya bersikap baik. Selain itu, negara-negara *middle powers* menunjukkan preferensi yang kuat terhadap multilateralisme karena hal ini dapat mengatasi kurangnya daya tawar mereka di tingkat bilateral (Thies & Sari, 2018). Dalam hal Poros Maritim Dunia, Presiden Jokowi menegaskan proyeksi kekuatan Indonesia adalah “kekuatan Indo-Pasifik”.

Kaitan daripada Samudera Pasifik dan Hindia telah menjadi arena utama kebijakan luar negeri Indonesia. Peran kepemimpinan Indonesia dalam *Indian Ocean Rim Alliance* (IORA) dari tahun 2015 hingga 2017 memberikan peluang untuk memperluas pengaruhnya di kawasan (Sebastian & Syailendra, 2014). Hal ini termasuk diskusi mengenai perjanjian perbatasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Australia dan Papua Nugini. Indonesia juga memiliki perjanjian landas benua dengan berbagai negara seperti Malaysia, Australia, Papua Nugini, Thailand, Singapura, dan India. Sebagai negara netral, Indonesia juga mengupayakan penyelesaian perselisihan internasional secara multilateral dengan berupaya mendorong kompromi. Peran Indonesia menunjukkan upayanya untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan melalui forum diskusi (Saha, 2016). Oleh karena itu, diplomasi maritim Indonesia melalui Poros Maritim Dunia harus dapat ditingkatkan lebih kuat dibandingkan sebelumnya.

B. Trans-Regionalisme dan Poros Maritim Dunia

Kapasitas mengacu pada kemampuan negara-negara *middle power* yang lebih mengandalkan keterampilan diplomasi dibandingkan kekuatan militer. Ini penting dalam hubungan dan bagaimana ide-ide mereka menyebar dan mempengaruhi pihak lain. Sebagai *middle power*, Indonesia juga menekankan kapasitas diplomasinya untuk mempromosikan gagasan Indo-Pasifik berdasarkan ASEAN *centrality*. Cara hal ini dilakukan dieksplorasi melalui hubungan dengan beberapa hal lain.

Kapasitas mengacu pada kemampuan negara-negara *middle power* yang lebih mengandalkan keterampilan diplomasi dibandingkan kekuatan militer. Ini penting dalam hubungan dan bagaimana ide-ide mereka menyebar dan mempengaruhi pihak lain. Sebagai *middle power*, Indonesia juga menekankan kapasitas diplomasinya untuk mempromosikan gagasan Indo-Pasifik berdasarkan ASEAN *centrality*. Cara hal ini dilakukan dieksplorasi melalui hubungan dengan beberapa hal lain.

Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia memprioritaskan kawasan Indo-Pasifik dan menetapkan tujuannya untuk menjadi bagian dari poros-poros maritim dunia. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk konsentrasi di mana *middle power* memprioritaskan tujuan kebijakan luar negeri untuk mencapai hasil yang diinginkan. Negara-negara adidaya mempunyai kemampuan untuk fokus pada banyak bidang, namun negara-negara pusat tidak memiliki kemampuan dibandingkan dengan negara-negara adidaya dan perlu fokus pada isu-isu pada kebijakan luar negeri. Hal ini dikenal sebagai diplomasi “*niche*” (Ravenhill, 1998). Ketika Presiden Jokowi terlantik pada akhir 2014, Indonesia menegaskan dirinya sebagai kekuatan angkatan laut karena posisinya yang strategis antara Samudera Hindia dan Pasifik, sehingga menekankan fokus terhadap Indo-Pasifik melalui strategi Poros Maritim Dunia (Scott, 2019).

Kawasan Indo-Pasifik dipandang sebagai masalah geopolitik bagi Indonesia, dan konfrontasi strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok hanya akan memecah belah atau mempolarisasi kawasan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai adalah perdamaian, stabilitas, dan pembangunan regional. Karena Asia Tenggara terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, ASEAN *centrality* perlu dipertahankan untuk menjamin kawasan Indo-Pasifik agar tidak menjadi arena persaingan antara *great powers* dan menjaga keterbukaan, transparansi, dan inklusivitas di kawasan (Scott, 2019). Indonesia tidak hanya berperan sebagai pusat daripada dinamika maritim, namun juga memikul tanggung jawab (Scott, 2019).

Dalam hal ini, para kekuatan sentral memiliki kreativitas yang terkait dengan kepemimpinan intelektual dan kewirausahaan. Menurut Oran R. Young, kepemimpinan intelektual memandu cara aktor mengandalkan kemampuannya sendiri dalam memunculkan energi dan gagasan politik yang dapat membentuk perilaku dan perspektif aktor lain melalui negosiasi institusional (Young, 1991). Ide ini sendiri bukanlah hal baru, karena dapat ditelusuri kembali ke Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa pada masa kepemimpinan periode kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, beliau mengalihkan perhatiannya ke Indo-Pasifik. Ia melanjutkan bahwa ada “*lack of trust*” di kawasan Indo-Pasifik, yang mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan dan telah berupaya membina hubungan berdasarkan kepentingan bersama (Weatherbee, 2019). Sebagai contoh, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan pada pidato di *United Nations General Assembly* (UNGA) pada 11 Januari 2018 yang menyatakan, “*Indonesia wants ecosystem of peace, stability, prosperity to be established not only in ASEAN, but also in Indo-Pacific. Therefore, together with ASEAN, Indonesia will contribute in advancing a strong positive cooperation in the Indo-Pacific. Instead of a cooperation that is based on suspicion or worse, a perception of threat*” (The Jakarta Post, 2018). Indonesia akan bekerja sama dengan negara lain di kawasan dan mengembangkan naungan kerjasama Indo-Pasifik akan ASEAN centrality.

Jika kepemimpinan intelektual adalah tentang menghasilkan ide, maka kepemimpinan secara korporat adalah tentang mendorong pemangku kepentingan untuk menerima kesepakatan sambil membiarkan kekuatan pusat menggunakan keterampilan tawar-menawar mereka untuk mempengaruhi dan membentuk isu-isu dengan cara yang komprehensif (Young, 1991). Pada tahun 2018 dan 2019, Indonesia mempromosikan konsep Indo-Pasifik baik ke negara-negara ASEAN maupun EAS. Konsep ini telah disampaikan Presiden Jokowi pada KTT ASEAN ke-32 pada 28 April 2018, dan selanjutnya disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada 16 Mei 2018 di *Center for Strategic and International Studies* (CSIS). Konsep ini juga secara resmi dipresentasikan pada Konferensi Tingkat Menteri EAS ke-8 pada tanggal 9 Agustus 2018. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi lebih lanjut meyakinkan para menteri bahwa konsep tersebut tidak dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme baru atau menggantikan mekanisme yang sudah ada, namun untuk menyempurnakan mekanisme yang sudah ada sesuai dengan dinamika regional (Weatherbee, 2019).

Pidato Joko Widodo pada EAS ke-13 pada 15 November 2018 semakin menegaskan bahwa Indonesia akan membahas konsep Indo-Pasifik secara lebih terbuka dengan negara-negara EAS. Ia juga menegaskan bahwa ia menyatukan dua samudra menjadi satu teater geopolitik. Pada dasarnya, perdamaian dan keamanan di Samudera Hindia dan Pasifik harus terjaga. Ini bukan perebutan sumber daya alam, konflik regional, atau hegemoni maritim. Sebaliknya, hal ini bertujuan untuk menjadikan kedua lautan tersebut sebagai penghubung rute dunia.

Konsep Indo-Pasifik sendiri berfokus pada tiga bidang kerjasama, yaitu: kerja sama maritim, infrastruktur dan konektivitas, serta pembangunan berkelanjutan (Pratiwi, Puspitasari, Hikmawati, & Bagus, 2021). Bidang kerja sama tersebut sejalan dengan pilar-pilar Poros Maritim Dunia dan tujuh pilar daripada Kebijakan Kelautan Indonesia (Pratiwi, Puspitasari, Hikmawati, & Bagus, 2021): (1) pengembangan maritim dan sumber daya manusia, (2) keamanan maritim, penegakan hukum dan keselamatan di laut, (3) kelautan tata kelola dan kelembagaan, (4) pengembangan ekonomi maritim, (5) pengelolaan ruang laut dan perlindungan maritim, (6) budaya maritim, dan (7) diplomasi maritim.

Namun konsep tersebut kurang diminati oleh negara-negara ASEAN lainnya karena kurang antusiasnya, terutama Singapura yang menyatakan bahwa konsep tersebut kurang jelas (Pratiwi, Puspitasari, Hikmawati, & Bagus, 2021). Hal ini juga disebabkan oleh pandangan anggota ASEAN lainnya yang menganggap konsep tersebut sebagai langkah awal untuk mundur dari ASEAN dan menjadi lebih terpusat pada Indonesia (Pratiwi, Puspitasari, Hikmawati, & Bagus, 2021). Mereka khawatir dengan kemungkinan menjadikan EAS sebagai mekanisme standar konsep ini (Anwar, Indonesia dan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, 2020). Setelah melalui proses yang panjang,

Indonesia kemudian menguraikan rancangan tersebut melalui sebuah dokumen berjudul “*Indonesia's perspective for an ASEAN outlook on the Indo-Pacific: towards a peaceful, prosperous, and inclusive region*” (Pratiwi, Puspitasari, Hikmawati, & Bagus, 2021).

Selanjutnya, untuk menyelesaikannya, Indonesia mengadakan dialog tingkat tinggi mengenai kerja sama Indo-Pasifik di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2019. Dialog ini menjadi wadah untuk berdiskusi dan bertukar pandangan mengenai peluang kerja sama (Anwar, *Indonesia and ASEAN Outlook on the Indo-Pacific*, 2020). Rancangan tersebut akhirnya diadopsi oleh ASEAN pada KTT ASEAN ke-34 pada 16 Juni 2019. Sukma mengatakan, “*This Outlook promises that ASEAN will continue to maintain its central role in the evolving regional fabric [...] and continue to be an honest broker in a strategic environment of competing interests*” (Sukma, 2019).

Terakhir, kepemimpinan intelektual dan kewirausahaan diarahkan untuk membangun koalisi. Bagi negara-negara *middle power*, koalisi negara-negara yang berpikiran sama sangat penting untuk mencapai tujuan mereka. Ini karena kekuatan perantara tidak sekuat negara adidaya. Negara-negara *middle power* cenderung membentuk koalisi melalui jalur multilateral. Sehubungan dengan hal tersebut, seperti yang disampaikan oleh pada EAS ke-9 tanggal 13 November 2014, Indonesia sangat mementingkan multilateralisme untuk mencapai tujuannya; “*For Indonesia, EAS plays an important role in promoting security, stability, and prosperity in the region. Therefore, I choose this multilateral forum to express our view of becoming a global maritime axis*” (Pratiwi, Puspitasari, Hikmawati, & Bagus, 2021). Sebagai kekuatan maritim yang kuat, Indonesia berkomitmen untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Samudera Hindia dan Pasifik, dan akan menghadapi segala jenis tantangan (Ravenhill, 1998).

Kredibilitas adalah dasar yang pertama. Ravenhill menggambarkan kredibilitas sebagai kemungkinan bahwa gagasan dan inisiatif pemerintah pusat akan diterima oleh semua pihak (Ravenhill, 1998). Sebaliknya, mereka menekankan keuntungan secara dua-arah dan kebaikan bersama. Inisiatif Indo-Pasifik yang tertuang dalam *ASEAN Outlook on the Indo-Pacific* (AOIP) diterima secara luas. Tan berargumentasi bahwa respons Amerika Serikat terhadap “*One Belt, One Road*” yang dicanangkan Tiongkok memaksa negara-negara di kawasan untuk berpihak (Tan, 2020). Hal ini diperburuk dengan ketatnya persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, dimana *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) milik Jepang lebih banyak digunakan untuk melawan Tiongkok. Pendekatan eksklusifnya dapat membahayakan *ASEAN centrality*.

Dalam konteks ini, AOIP di Indo-Pasifik menawarkan pendekatan berbeda dengan menekankan sentralitas dan inklusivitas daripada ASEAN. AOIP akan melibatkan semua kekuatan di EAS, termasuk Tiongkok. Selain itu, ada dimensi keandalan yang disebutkan Ravenhill (Ravenhill, 1998). Dalam konteks ini, seperti kata Menteri Luar Negari Retno Marsudi, tidak ada keraguan bahwa Indonesia ingin menjadi mitra sejati bagi perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan (Pratiwi, Puspitasari, Hikmawati, & Bagus, 2021). Hal ini secara konsisten didorong dan mereka telah mengambil inisiatif dalam masalah ini. Menanggapi FOIP dan konfrontasi strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia telah memainkan peran penting dalam membentuk pandangan Indo-Pasifik. Mengingat AOIP merupakan perpanjangan dari visi Poros Maritim Dunia, Weatherbee (Weatherbee, 2019) dan Anwar (Anwar, *Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific*, 2020) telah menanggapi FOIP tentang bagaimana Indonesia akan memastikan implementasi AOIP dengan memperkuat Indonesia di sektor maritim dan mendukung Poros Maritim Dunia.

Sukma menyampaikan untuk memberikan penguatan kepada hal-ha berikut: (1) penting bagi Indonesia untuk sepenuhnya menerapkan strategi maritimnya; dan (2) Indonesia berkomitmen untuk mendorong multilateralisme melalui diskusi dalam mekanisme yang dipimpin ASEAN mengenai strategi bersama untuk Indo-Pasifik (Sukma, 2019). Indonesia harus terlibat secara aktif dalam persaingan strategis dengan anggota ASEAN lainnya. Selain itu, Indonesia berharap AOIP dapat

berfungsi sebagai sarana menyeluruh bagi semua visi regional yang bersaing, sekaligus meredakan perebutan kekuasaan di kawasan.

5. KESIMPULAN

Harapannya melalui tulisan ini, Indonesia dapat mengambil tindakan di masa depan. Indonesia menjadikan doktrin Poros Maritim Dunia sebagai strategi untuk meningkatkan pamor, peran, dan pengaruhnya dalam tatanan regional dan internasional. Meski demikian, Indonesia masih bergantung pada ASEAN, sehingga bukan berarti Indonesia akan keluar dari ASEAN. Indonesia juga memainkan peran penting dalam ASEAN, dan terdapat banyak ruang bagi Indonesia untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di ASEAN. Selain itu, Indonesia tidak membiarkan strategi Poros Maritim Dunia bertindak melawan *Belt and Road Initiative* (BRI) dan FOIP. Sepatutnya, Indonesia harus mengembangkan hubungan dan kerjasama dengan BRI dan FOIP di semua bidang yang menjadi kepentingannya.

Menjadi isu terpenting bagi Indonesia adalah agar dapat berfungsi sebagai kekuatan militer geopolitik terkemuka di kawasan Indo-Pasifik sebagai *middle power*. Untuk mencapai tujuan tersebut, mewujudkan visi Indonesia sebagai salah satu poros-poros maritim dunia diperlukan perbaikan khususnya di bidang militer. Hal ini memenuhi tantangan yang semakin besar, ancaman dari sumber militer yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah serta keselamatan rakyat Indonesia. Dari alokasi anggaran pertahanan saat ini masih perlu peningkatan, yang saat ini hanya sekitar 0,8% dari PDB, untuk membangun kawasan pertahanan yang kuat. Strategi anggaran juga harus diprioritaskan diberikan pada biaya alutsista yang cukup kuat dan komprehensif bagi angkatan pertahanan, angkatan darat, laut, udara, siber, dan angkatan antariksa.

Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah merancang kebijakan dengan garis mandat yang jelas dan pembagian tugas dari Presiden kepada kementerian atau lembaga yang bertanggung jawab. Dengan cara ini pembagian tugas antar lembaga akan semakin jelas dan pelaksanaannya tidak akan terjadi tumpang-tindih. Selain itu, pemerintah harus membuat landasan hukum dalam melaksanakan program masing-masing menteri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Potensi Utama yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam penyelesaian penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Anwar, D. F. (1994). Indonesia's Foreign Policy After the Cold War. *Southeast Asian Affairs*, 146-163.
 - [2] Anwar, D. F. (2020). Indonesia and the ASEAN outlook on the Indo-Pacific. *International Affairs*, 96(1).
 - [3] Asia Global Institute. (2019, September 19). *Flawed Assumptions: Why the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific is Defective*. Retrieved from AsiaGlobal Online: Geopolitics:
<https://www.asiaglobalonline.hku.hk/flawed-assumptions-why-the-asean-outlook-on-the-indo-pacific-is-defective/>
-

- [4] Butcher, J. (2009). Becoming an Archipelagic State: The Juanda Declaration of 1957 and the 'Struggle' to Gain International Recognition of the Archipelagic Principle. In M. Cribb, & M. Ford, *Indonesia beyond the Water's Edge: Managing an Archipelagic State* (pp. 28-48). Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institut.
- [5] Butcher, J. G., & Elson, R. E. (2017). *Sovereignty and the Sea: How Indonesia Became an Archipelagic State*. Singapore: National University of Singapore Press.
- [6] Djalal, D. P. (1996). *The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- [7] Edstrom, H., & Westberg, J. (2020). The defense strategies of middle powers: Competing for security, influence and status in an era of unipolar demise. *Comparative Strategy*, 39(2), 174.
- [7] Gammon, L. (2019, October 25). *What was that election for again?* Retrieved from New Mandala: <https://www.newmandala.org/what-was-that-election-for-again/>
- [8] Hatta, M. (1953). Indonesia's Foreign Policy. *Foreign Affairs*, 31(3), 441-452.
- [9] Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2015, November 13). *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia*. Retrieved from PresidenRI.go.id: <http://www.presidentri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>
- [10] Kompas. (2014, 08 21). *Gagasan Poros Maritim*. Retrieved from Kompas.com Ekonomi: Makro: <https://money.kompas.com/read/2014/08/21/080000726/Gagasan.Poros.Maritim>
- [11] Laksmana, E. (2011). The enduring strategic trinity: explaining Indonesia's geopolitical architecture. *Journal of the Indian Ocean Region*, 7(1), 96.
- [12] Laksmana, E. (2017, March 23). *Indonesia Sea Policy: Accelerating Jokowi's Global Maritime Fulcrum*. Retrieved from Asia Maritime Transparency Initiative: <https://amti.csis.org/indonesian-sea-policy-accelerating/>
- [13] Laksmana, E. (2018, December 15). *Indonesian foreign policy needs to focus more on impact than process*. Retrieved from The Jakarta Post Academia: Opinion: <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/12/15/indonesian-foreign-policy-needs-to-focus-more-on-impact-than-process.html>
- [14] Manggala, P. U. (2015, March 22). *Rethinking Indonesia's global maritime axis*. Retrieved from The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/news/2015/03/22/rethinking-indonesia-s-global-maritime-axis.html>
- [15] Muhibat, S. F. (2017). Indonesia's New Ocean Policy: Analysing the External Dimension. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*,.
- [16] Pratiwi, F., Puspitasari, I., Hikmawati, A., & Bagus, H. (2021). Global Maritime Fulcrum: Indonesia's Middle Power Strategy Between Belt And Road Initiatives (BRI) and Free-Open Indo Pacific (FOIP). *Central European Journal of International and Security Studies*, 15(3), 30-54.
- [17] Ravenhill, J. (1998). Cycles of Middle Power Activism: Constraint and Choice in Australia and Canadian Foreign Policies. *Australian Journal of International Affairs*, 52(3).
- [18] Saha, P. (2016). Indonesia's potential as a maritime power. *Maritime Affairs: Journal of the National Maritime Foundation of India*.
- [19] Scott, D. (2019). Indonesia Grapples with the Indo-Pacific: Outreach, Strategic Discourse, and Diplomacy. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.
- [20] Sebastian, L. C., & Syailendra, E. A. (2014). Jokowi's "Look West" Foreign Policy: Expanding Indonesia's Sphere of Influence. *Raharhatnam School of International Studies Commentary*.
- [21] Simatupang, H. Y., & Panggabean, M. R. (2022). The Implementation of Indonesia's Free and Active Foreign Policy Over the Russia-Ukraine War During Indonesia's G20 Presidency. *International*

Conference on Sustainable Innovation on Humanities, Education, and Social Sciences (ICOSI-HESS 2022) (pp. 590-602). Amsterdam: Atlantis Press.

- [22] Souter, J. (2016). Good International Citizenship and Special Responsibility to Protect Refugees. *The British Journal of Politics and International Relations*, 18(4).
 - [23] Sukma, R. (2019). Indonesia, ASEAN and shaping the Indo-Pacific idea. *East Asia Forum*.
 - [24] Tan, S. S. (2020). Consigned to hedge: South-east Asia and America's 'free and open Indo-Pacific' strategy. *International Affairs*, 96(1).
 - [25] The Jakarta Post. (2017, August 21). *16,000 Indonesian islands registered at UN*. Retrieved from The Jakarta Post News: National: <https://www.thejakartapost.com/news/2017/08/21/16000-indonesian-islands-registered-at-un.html>
 - [26] The Jakarta Post. (2018, January 11). *[Full text] Indonesia: Partner for peace, security, prosperity*. Retrieved from Academia: Opinion: <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/01/10/full-text-indonesia-partner-for-peace-security-prosperity.html>
 - [27] The Jakarta Post. (2019, October 30). *Economy permeates foreign policy priorities*. Retrieved from The Jakarta Post News: World: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/30/economy-permeates-foreign-policy-priorities.html>
 - [28] The Jakarta Post. (2019, October 20). *Jokowi highlights economic, bureaucratic reforms in inauguration speech*. Retrieved from The Jakarta Post News: National: <https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/20/jokowi-highlights-economic-bureaucratic-reforms-in-inauguration-speech.html>
 - [29] Thies, C. G., & Sari, A. C. (2018). A Role Theory Approach to Middle Powers: Making Sense of Indonesia's Place in the International System. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 40(3).
 - [30] Weatherbee, D. E. (2019). Indonesia, ASEAN, and the Indo-Pacific Cooperation Concept. *Perspective*.
 - [31] Witular, R. A. (2014, November 13). *Jokowi launches maritime doctrine to the world*. Retrieved from The Jakarta Post: <http://www.thejakartapost.com/news/2014/11/13/jokowi-launches-maritime-doctrine-world.html>
 - [32] Young, O. R. (1991). Political Leadership and Regime Formation: On the Development of Institutions in International Society. *International Organization*, 45(3).
-